



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2509-2515

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kekuatan Politik, Modal Manusia, dan Transformasi Digital dalam Membangun Kemandirian Ekonomi: Perspektif Ekonomi Politik Kontemporer

Salsabila¹, Nadya Nafisha², Putri Andini Nasution², Armin Rahmansyah Nasution³

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi

¹salsa.bilaaa0702@gmail.com, ²nadva.7223240004@mhs.unimed.ac.id, ³putriandinasution19@gmail.com,

⁴arminnasution@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hubungan antara kekuatan politik, modal manusia, dan transformasi digital sebagai tiga pilar utama dalam membangun kemandirian ekonomi Indonesia melalui pendekatan kualitatif studi literatur yang mencakup buku teori ekonomi politik, jurnal nasional dan internasional, serta laporan lembaga global seperti World Bank, OECD, UNCTAD, dan ILO. Kajian ini menunjukkan bahwa kekuatan politik memegang peran sentral dalam menentukan arah kebijakan ekonomi, menjaga stabilitas regulasi, serta melindungi sektor strategis dari tekanan eksternal, sehingga menjadi landasan penting bagi terbentuknya struktur ekonomi yang mandiri. Di sisi lain, modal manusia menjadi faktor kunci yang menentukan produktivitas, inovasi, dan kemampuan negara dalam mengadopsi maupun mengembangkan teknologi baru, sehingga meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global. Transformasi digital juga terbukti menjadi pendorong utama perubahan struktur ekonomi melalui otomatisasi, efisiensi produksi, perluasan sektor berbasis teknologi, peningkatan kualitas tata kelola publik, serta penguatan kapasitas industri domestik. Temuan penelitian menegaskan bahwa kemandirian ekonomi nasional tidak dapat dicapai hanya melalui salah satu elemen, melainkan melalui sinergi antara kebijakan politik yang adaptif, pembangunan modal manusia yang berkelanjutan, dan digitalisasi yang inklusif. Ketiga elemen tersebut membentuk kerangka strategis yang memungkinkan Indonesia memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi ketergantungan eksternal, dan meningkatkan daya saing global, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi perumusan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kekuatan Politik, Modal Manusia, Transformasi Digital, Kemandirian Ekonomi, Ekonomi Politik

1. Latar Belakang

Kemandirian ekonomi nasional merupakan salah satu agenda strategis bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama di tengah dinamika global yang ditandai oleh perubahan politik, intensifikasi persaingan ekonomi, serta percepatan transformasi teknologi digital. Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi tidak dapat dilepaskan dari peran kekuatan politik sebagai penentu arah kebijakan ekonomi, kualitas modal manusia sebagai fondasi produktivitas dan inovasi, serta transformasi digital sebagai pendorong perubahan struktur ekonomi modern. Dalam konteks inilah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi literatur (library research) untuk menganalisis secara mendalam keterkaitan antara kekuatan politik, pengembangan modal manusia, dan transformasi digital dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Penelitian ini menelaah berbagai sumber ilmiah kredibel, mulai dari buku teori ekonomi politik, jurnal-jurnal nasional dan internasional, hingga laporan lembaga global seperti World Bank, OECD, UNCTAD, dan ILO.

Kekuatan politik dipahami sebagai faktor fundamental yang menentukan orientasi pembangunan ekonomi, stabilitas kebijakan, dan kapasitas negara dalam melindungi sektor strategis dari tekanan eksternal. Sejumlah literatur menegaskan bahwa konsistensi kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik dan komitmen negara dalam mengarahkan industrialisasi, regulasi investasi, serta strategi penguatan struktur ekonomi domestik. Pada saat yang sama, modal manusia menjadi pilar penting dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi, karena kualitas pendidikan, keterampilan, dan kapasitas inovasi masyarakat menentukan kemampuan negara untuk mengadopsi dan mengembangkan teknologi, melakukan transformasi struktural, serta menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan

Kekuatan Politik, Modal Manusia, dan Transformasi Digital dalam Membangun Kemandirian Ekonomi:
Perspektif Ekonomi Politik Kontemporer

meningkatnya perhatian terhadap keterkaitan antara kapasitas politik negara, kesiapan SDM, dan penetrasi teknologi digital sebagai faktor utama daya saing nasional. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa kajian ekonomi politik kontemporer tidak lagi hanya berfokus pada variabel ekonomi, tetapi juga pada dinamika kekuasaan, kompetensi manusia, dan teknologi sebagai satu kesatuan analitis. Selain itu, transformasi digital telah mengubah secara signifikan pola produksi, distribusi, dan layanan publik, sehingga membuka peluang bagi negara untuk memperkuat efisiensi ekonomi, menciptakan sektor-sektor baru, dan meningkatkan daya saing industri domestik. Teknologi digital bukan hanya alat produksi baru, tetapi juga instrumen strategis yang dapat meningkatkan kapasitas negara dalam tata kelola ekonomi, pengelolaan sumber daya, dan penciptaan inovasi. Namun, keberhasilan transformasi digital bergantung pada kualitas regulasi politik dan kesiapan modal manusia, sehingga ketiga faktor tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti peran penting kekuatan politik (Prastyo et al., 2024), modal manusia (Becker, 1993; Hanushek & Woessmann, 2012) dan transformasi digital (Bukht & Heeks, 2018; UNCTAD, 2021), sebagian besar kajian terdahulu masih membahas ketiga aspek ini secara terpisah. Di sinilah terlihat kesenjangan penelitian (research gap). Belum banyak studi yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu kerangka ekonomi politik untuk memahami bagaimana interaksi politik, SDM, dan digitalisasi secara bersama-sama memengaruhi kemandirian ekonomi suatu negara. Padahal, dalam konteks perubahan global yang cepat, integrasi ketiga elemen tersebut menjadi faktor penentu kapasitas negara menghadapi kompetisi internasional.

Kebaruan penelitian ini (novelty) terletak pada pendekatan terintegrasi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara kekuatan politik, modal manusia, dan transformasi digital dalam membangun kemandirian ekonomi Indonesia. Pendekatan ini memberikan perspektif lebih komprehensif dibanding penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti satu atau dua variabel secara terpisah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori ekonomi politik kontemporer, terutama dalam memahami kemandirian ekonomi sebagai fenomena multidimensi.

Melalui analisis literatur yang komprehensif, penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh interaksi sinergis antara kekuatan politik, modal manusia, dan transformasi digital. Ketika ketiga elemen ini berjalan secara harmonis melalui kebijakan politik yang adaptif, pembangunan SDM yang berkelanjutan, serta digitalisasi yang inklusif Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat basis industri domestik, meningkatkan daya saing global, dan mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi eksternal. Oleh karena itu, kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana dinamika politik, kualitas SDM, dan inovasi teknologi dapat menjadi fondasi strategis bagi pembangunan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) yang dilakukan melalui proses penelusuran, pengumpulan, evaluasi, dan sintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara kekuatan politik, pengembangan modal manusia, dan transformasi digital dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Seluruh sumber yang digunakan mencakup buku-buku teori ekonomi politik kontemporer, literatur mengenai human capital dan pembangunan ekonomi, jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang telah melalui proses peer-reviewed, artikel ilmiah terbaru mengenai digitalisasi ekonomi, serta laporan resmi dari lembaga internasional seperti World Bank, OECD, UNCTAD, dan ILO yang menyediakan analisis global terkait dinamika politik, teknologi, dan daya saing ekonomi suatu negara. Literatur tersebut dipilih melalui serangkaian kriteria ketat yang menekankan relevansi tematik, tingkat kredibilitas akademik, tahun publikasi yang mutakhir, serta keterkaitannya dengan variabel utama penelitian. Proses analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan interpretasi kualitatif untuk mengidentifikasi pola, hubungan teoretis, argumentasi konseptual, serta kesenjangan penelitian yang berkaitan dengan peran kekuatan politik dalam pembentukan kebijakan ekonomi, kontribusi modal manusia terhadap daya saing nasional, dan dampak transformasi digital terhadap struktur ekonomi dan kapasitas negara. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak menggunakan data statistik atau metode kuantitatif, tetapi sepenuhnya berfokus pada pendalaman teori dan penalaran akademik, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif yang dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan strategi kemandirian ekonomi dalam konteks ekonomi politik kontemporer.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Kekuatan Politik Memengaruhi Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Indonesia

Kekuatan politik di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional, terutama dalam konteks pembangunan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi. Dalam sistem politik Indonesia, negara memiliki posisi dominan sebagai policy maker dan regulator yang mampu mengarahkan struktur ekonomi melalui pembuatan regulasi, proteksi terhadap sektor strategis, serta pengendalian arus modal dan investasi.

Studi Prastyo et al. (2024) menekankan bahwa stabilitas politik merupakan syarat penting untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang konsisten. Ketika dinamika politik mengalami ketegangan, seperti menjelang pemilu atau ketika terjadi konflik kepentingan antar-elit, kebijakan ekonomi cenderung menjadi tidak stabil, sehingga mengganggu iklim investasi dan menghambat pembangunan industri domestik yang sedang diarahkan menuju kemandirian. Di sisi lain, penelitian pada bidang industrialisasi oleh Muhammad (2023) menunjukkan bahwa negara menggunakan kekuatan politiknya untuk mengintervensi pasar demi mempercepat industrialisasi, misalnya melalui insentif fiskal, pembatasan impor, dan penataan struktur industri nasional. Penguatan ekonomi nasional, menurut penelitian tersebut, tidak dapat dipisahkan dari kekuatan politik negara yang mampu menciptakan regulasi strategis untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan eksternal. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa kemandirian ekonomi Indonesia tidak hanya merupakan persoalan ekonomi semata, tetapi juga hasil dari proses politik yang kompleks, di mana negara, partai politik, dan stabilitas pemerintahan berkolaborasi dalam menentukan arah pembangunan ekonomi yang berdaulat dan tidak bergantung pada kekuatan asing.

Kekuatan politik di Indonesia memainkan peran krusial dalam membentuk kebijakan ekonomi nasional yang diarahkan untuk mencapai kemandirian ekonomi, karena aktor politik (negara maupun partai) dapat menggunakan wewenang institusionalnya untuk menetapkan prioritas pembangunan yang berorientasi pada kontrol domestik atas sumber daya strategis. Misalnya, studi “Industrialisasi Sebagai Kekuatan Politik Negara” menyatakan bahwa industrialisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi negara dalam arena politik melalui mekanisme kebijakan protektif dan regulasi yang mengatur investasi asing. Selain itu, pemikiran ideologis tokoh ekonomi seperti Soemitro Djojohadikusumo juga memberi dasar normatif bagi intervensi negara: dalam analisis ulang pemikirannya, penekanan pada trilogi kedaulatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi menunjukkan bahwa negara harus berperan aktif dalam mengontrol sektor-sektor strategis agar ekonomi nasional tidak bergantung sepenuhnya pada kekuatan pasar global.

Lebih jauh, aspek ideologi ekonomi, seperti nasionalisme ekonomi, telah dianalisis oleh Thee Kian Wie yang menyatakan bahwa nasionalisme ekonomi (economic nationalism) sudah lama menjadi instrumen politik negara untuk mempertahankan kemandirian atas aset produktif, terutama melawan dominasi asing di sektor-sektor penting. Selain itu, stabilitas politik yang ditopang sistem konstitusi dan lembaga negara juga berimplikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi: sistem tata negara yang demokratis dan terdesentralisasi, menurut kajian, dapat meningkatkan legitimasi kebijakan ekonomi jangka panjang dan memungkinkan negara untuk merumuskan kebijakan protektif ataupun pembangunan industri lokal dengan landasan institusional yang kuat. Dengan demikian, kekuatan politik baik melalui ideologi negara, struktur partai, maupun sistem pemerintahan menjadi determinan penting dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung kemandirian ekonomi Indonesia, bukan hanya pada aspek proteksi, tetapi juga pembangunan kapabilitas dalam negeri secara berkelanjutan.

3.2. Pengembangan Modal Manusia Berkontribusi Pada Peningkatan Daya Saing Dan Kemandirian Ekonomi Nasional

Pengembangan modal manusia memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan daya saing serta kemandirian ekonomi nasional karena ia menjadi fondasi bagi kemampuan suatu negara untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global. Berbagai literatur ekonomi klasik dan kontemporer menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi, struktur industri, kemampuan inovasi teknologi, hingga kapasitas negara dalam mengurangi ketergantungan pada modal, teknologi, dan tenaga ahli asing. Schultz (1961) dan Becker (1993) menekankan bahwa modal manusia adalah bentuk investasi jangka panjang yang memberikan dampak berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan kemampuan individu dalam menghasilkan output bernilai tambah tinggi. Negara yang memiliki SDM terdidik mampu membangun industri yang lebih kompleks, mendorong pertumbuhan sektor teknologi, serta menghasilkan pengetahuan baru yang menjadi

sumber daya strategis dalam persaingan global. Peningkatan kualitas pendidikan formal dan vokasional memungkinkan tenaga kerja menguasai keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan proses industri modern, mulai dari teknologi informasi, otomasi, manufaktur canggih, hingga sektor riset dan pengembangan (R&D). Literatur kontemporer seperti Hanushek dan Woessmann (2012) menegaskan bahwa bukan hanya tingkat pendidikan yang penting, tetapi kualitas pembelajaran yang tercermin dari kemampuan kognitif, literasi numerasi, dan keterampilan pemecahan masalah yang menjadi indikator paling kuat dalam meningkatkan daya saing nasional. Dengan kemampuan kognitif tinggi, tenaga kerja lebih mudah mengadopsi teknologi baru, berinovasi dalam proses produksi, dan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Modal manusia juga menjadi kunci bagi proses transformasi struktural, yaitu perpindahan ekonomi dari sektor tradisional berproduktifitas rendah menuju sektor bernilai tambah tinggi. Studi Autor, Levy, dan Murnane (2003) menunjukkan bahwa digitalisasi dan otomasi menuntut keterampilan non-rutin, analitis, dan kreatif; sehingga negara yang memiliki SDM unggul dapat melakukan transformasi sektor primer menjadi industri manufaktur dan jasa modern yang memiliki daya saing kuat. Transformasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas dan ekspor bahan mentah yang rentan terhadap fluktuasi pasar global. Dengan basis modal manusia yang lebih baik, negara dapat mengembangkan industri hilir, memperkuat rantai pasok domestik, dan menciptakan ekosistem produksi yang mampu berdiri sendiri tanpa dominasi perusahaan asing. Romer (1990) dan Aghion & Howitt (2006) menyatakan bahwa inovasi domestik hanya dapat tercapai jika negara memiliki tenaga ahli dan peneliti berkualitas tinggi yang dapat menghasilkan teknologi baru. Teknologi domestik inilah yang kemudian mengurangi kebutuhan impor teknologi dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Literatur OECD (2019) bahkan menunjukkan bahwa negara-negara yang sukses membangun kapasitas inovasi seperti Korea Selatan, Finlandia, dan Jerman melakukan itu dengan terlebih dahulu memperkuat kualitas modal manusia melalui pendidikan teknis, penelitian universitas, serta integrasi pendidikan-industri.

Selain itu, modal manusia berperan dalam membangun kemandirian ekonomi melalui peningkatan kapasitas absorpsi teknologi (*absorptive capacity*), yaitu kemampuan suatu negara untuk memahami, mengadaptasi, dan memperbaiki teknologi yang diperoleh dari luar negeri. Kapasitas absorpsi sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, keterampilan teknis, dan kemampuan belajar cepat yang dimiliki tenaga kerja dan lembaga riset nasional. Negara yang memiliki kemampuan absorpsi tinggi dapat memanfaatkan investasi asing langsung (FDI) untuk memperkuat industri domestik, bukan hanya menjadi tempat produksi berbasis tenaga kerja murah. Hal ini sejalan dengan temuan World Bank (2020) bahwa kualitas modal manusia memperkuat *productivity spillover* dari investor asing sehingga meningkatkan daya saing nasional secara signifikan. Dalam konteks ini, modal manusia berfungsi sebagai jembatan antara aliran teknologi global dengan pembentukan sistem inovasi nasional.

Tidak kalah penting, pembangunan modal manusia yang inklusif yang menekankan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi dan politik yang mendukung kemandirian nasional. Todaro dan Smith (2015) menjelaskan bahwa ketika masyarakat memiliki akses luas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, mobilitas sosial meningkat, produktivitas nasional lebih merata, dan ketergantungan pada tenaga kerja asing berkurang. Peningkatan kesehatan tenaga kerja juga meningkatkan produktivitas dan kesiapan fisik untuk berpartisipasi dalam sektor formal. Selain itu, kajian Amartya Sen (1999) menegaskan bahwa modal manusia yang kuat memberikan kemampuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi nasional. Dalam konteks negara berkembang, pembangunan modal manusia bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan kohesi sosial yang menjadi prasyarat utama bagi stabilitas politik dan ekonomi jangka panjang. Stabilitas ini pada akhirnya mendukung kemandirian ekonomi karena negara dapat menjalankan kebijakan industri, teknologi, dan perdagangan dengan arah yang konsisten tanpa tekanan sosial-politik yang berlebihan.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan berbagai literatur dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan modal manusia merupakan faktor determinan yang tak terpisahkan dari upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi nasional. Ia mempengaruhi hampir seluruh aspek ekonomi mulai dari produktivitas, inovasi, transformasi struktural, hingga stabilitas politik dan sosial. Tanpa modal manusia yang kuat, negara akan sulit membangun ekonomi yang mandiri dan berdaya saing di tengah dinamika global yang cepat berubah. Sebaliknya, dengan investasi jangka panjang dalam pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan ekosistem inovasi, negara dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional, meningkatkan posisi tawar global, dan mewujudkan kemandirian yang berkelanjutan.

3.3 Transformasi Digital Memengaruhi Struktur Ekonomi Dan Kapasitas Nasional Dalam Konteks Kemandirian Ekonomi

Transformasi digital telah menjadi pendorong utama perubahan struktur ekonomi modern dan memainkan peran signifikan dalam membentuk kapasitas nasional menuju kemandirian ekonomi. Pada tingkat struktural, digitalisasi mengalihkan pola produksi, distribusi, dan konsumsi dari model konvensional berbasis tenaga fisik dan proses manual menuju model ekonomi berbasis informasi, inovasi, dan otomatisasi. Perubahan ini menciptakan struktur ekonomi yang lebih terintegrasi, efisien, dan cepat beradaptasi terhadap dinamika pasar global. Menurut Bukht dan Heeks (2018), ekonomi digital membentuk “new digital ecosystem” yang mendorong munculnya sektor-sektor baru, seperti e-commerce, fintech, ekonomi platform, dan industri berbasis data, yang secara langsung memperluas sumber pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kapasitas produktif nasional.

Di sisi lain, transformasi digital meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai kemandirian ekonomi melalui penguatan kapasitas industri domestik. Teknologi digital seperti kecerdasan buatan, big data, robotik, dan Internet of Things (IoT) memungkinkan proses produksi menjadi lebih efisien, menurunkan biaya operasional, mempercepat inovasi, dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja murah atau bahan baku impor. Chen (2020) menegaskan bahwa digitalisasi memungkinkan negara mengembangkan industri strategis yang mampu bersaing secara global tanpa harus sepenuhnya bergantung pada teknologi eksternal. Dalam konteks Indonesia, digitalisasi juga mendorong lahirnya UMKM berbasis teknologi dan startup yang membuka akses pasar lebih luas dan memperkuat fondasi ekonomi domestik.

Transformasi digital juga memengaruhi kapasitas nasional melalui peningkatan kualitas tata kelola, efektivitas kebijakan publik, dan pengelolaan sumber daya nasional. Teknologi digital memungkinkan pemerintah memperkuat sistem perpajakan digital, meningkatkan transparansi fiskal, mengurangi biaya transaksi administrasi, serta mempercepat pelayanan publik. Sebagai contoh, World Bank (2020) menekankan bahwa digitalisasi meningkatkan efektivitas negara dalam mengelola data ekonomi, memetakan potensi sektor produktif, dan merancang strategi pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based). Penguatan kapasitas ini sangat penting bagi negara berkembang yang ingin membangun kemandirian ekonomi melalui optimalisasi sumber daya domestik.

Selain itu, transformasi digital mengubah dinamika hubungan tenaga kerja dan struktur kompetensi yang dibutuhkan dalam perekonomian modern. Transformasi ini menuntut peningkatan modal manusia melalui pendidikan digital, literasi teknologi, dan keterampilan abad 21. Negara yang mampu mempersiapkan tenaga kerja digital-native memiliki peluang lebih besar mencapai kemandirian ekonomi karena tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta inovasi digital. Dalam perspektif ekonomi politik, digitalisasi memperkuat posisi negara dalam kompetisi global karena kemampuan menguasai teknologi menentukan kekuatan produksi, nilai tambah, dan daya tawar ekonomi (Castells, 2010).

Transformasi digital tidak sekadar mengubah struktur ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas nasional, memperluas basis industri strategis, meningkatkan kemandirian teknologi, dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan ekonomi eksternal. Jika negara mampu mengelola digitalisasi secara inklusif dan berkelanjutan, transformasi ini akan menjadi fondasi utama pembentukan kemandirian ekonomi dan daya saing nasional dalam era globalisasi baru.

3.4 Interaksi Antara Kekuatan Politik, Modal Manusia, Dan Transformasi Digital Membentuk Sinergi Dalam Memperkuat Kemandirian Ekonomi Indonesia

Kemandirian ekonomi Indonesia di era digital hanya dapat dipahami melalui relasi kompleks antara arah kebijakan politik, kualitas modal manusia, dan kecepatan transformasi teknologi. Dalam konteks ini, politik menjadi elemen struktural yang menentukan orientasi pembangunan, prioritas investasi negara, serta kerangka regulasi yang mengatur arus digitalisasi nasional. Negara menentukan bagaimana infrastruktur teknologi dibangun, bagaimana lembaga-lembaga publik didigitalisasi, serta bagaimana kedaulatan data dan ekonomi digital dikelola. Tanpa komitmen politik yang kuat, digitalisasi hanya akan menjadi agenda sektoral yang berjalan parsial dan tidak mampu menciptakan dampak ekonomi jangka panjang. Bangsawan, G. (2023) menjelaskan bahwa kebijakan transformasi digital Indonesia merupakan proses multisektor yang menuntut koordinasi lintas lembaga, dan bahwa integrasi antara kebijakan politik, pengembangan SDM, dan infrastruktur merupakan prasyarat untuk memastikan transformasi digital mampu memperkuat kapasitas ekonomi nasional.

Kualitas modal manusia menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan negara memanfaatkan peluang digital. Transformasi digital membutuhkan SDM dengan literasi teknologi yang memadai, kompetensi analitis, kreativitas, kemampuan adaptasi, serta keterampilan digital tingkat lanjut. Politik mungkin membangun infrastruktur dan menyediakan kebijakan, tetapi manusia yang menjalankan perubahan digital tersebut. Tanpa

tenaga kerja yang adaptif dan kompeten, digitalisasi berpotensi hanya menciptakan “infrastruktur kosong” yang tidak menghasilkan nilai ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Idat, D. G. (2019) yang menunjukkan bahwa penguatan SDM menjadi inti ketahanan ekonomi digital, karena transformasi teknologi bukan sekadar pembaruan alat, tetapi perubahan paradigma produksi, distribusi, dan nilai tambah ekonomi nasional.

Di lapangan, kesenjangan kompetensi digital masih menjadi tantangan besar. Banyak pelaku UMKM, tenaga kerja muda, dan aparat pemerintahan belum memiliki kemampuan digital yang memadai untuk mengadopsi teknologi secara produktif. Program-program pemerintah seperti Digital Talent Scholarship berupaya meningkatkan kapasitas digital, namun penelitian Shofiyani, A., & Salomo, R. V. (2025) menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait pemerataan akses pelatihan dan kesiapan peserta. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penguatan modal manusia dalam transformasi digital tidak hanya memerlukan pelatihan teknis, tetapi juga dukungan kebijakan, pendampingan, serta integrasi program pelatihan dalam ekosistem ekonomi digital nasional.

Transformasi digital juga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat dan adaptif, karena negara berfungsi sebagai pengarah, fasilitator, sekaligus regulator ekosistem digital. Kemampuan pemerintah daerah dan pusat dalam mengelola inovasi digital sangat menentukan efektivitas transformasi digital secara nasional. Penelitian Sulistiyo, H., Martua, A., & dkk. (2023) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengungkap bahwa kemampuan kelembagaan pemerintah dalam mengelola transformasi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang kapasitas institusional dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program digital secara konsisten.

Dari interaksi tiga elemen politik, manusia, dan teknologi, muncul suatu sinergi yang menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi nasional. Ketika kebijakan politik selaras dengan penguatan kapasitas manusia dan diikuti digitalisasi yang inklusif, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada komoditas primer, mempercepat inovasi berbasis teknologi, serta memperluas basis ekonomi nasional ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Transformasi digital memungkinkan integrasi pasar, efisiensi produksi, peningkatan transparansi pemerintahan, serta penciptaan model bisnis baru yang mendukung kemandirian nasional. Namun, jika salah satu elemen lemah, misalnya regulasi yang tidak adaptif atau SDM yang tidak siap digitalisasi justru dapat memperlebar ketimpangan sosial ekonomi dan membuat Indonesia semakin bergantung pada teknologi asing. Keselarasan inilah yang menjadi tantangan utama pembangunan digital Indonesia.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi Indonesia merupakan hasil dari hubungan yang saling menguatkan antara kekuatan politik, modal manusia, dan transformasi digital. Kekuatan politik menjadi fondasi utama karena melalui stabilitas pemerintahan, arah kebijakan ekonomi dapat ditetapkan secara konsisten untuk melindungi sektor strategis, memperkuat industrialisasi, serta membangun struktur ekonomi yang lebih mandiri. Modal manusia terbukti menjadi pilar penting dalam mendorong produktivitas, inovasi, dan kemampuan negara untuk mengadopsi serta mengembangkan teknologi yang menentukan daya saing di tengah dinamika global. Transformasi digital, sebagai kekuatan baru dalam ekonomi kontemporer, mempercepat perubahan struktur ekonomi melalui otomatisasi, efisiensi produksi, penciptaan sektor berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas tata kelola publik. Interaksi ketiga elemen ini membentuk sinergi strategis yang memungkinkan Indonesia memperkuat basis ekonomi domestik, meningkatkan daya saing global, dan mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi eksternal. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan politik yang adaptif, kualitas SDM yang memadai, dan digitalisasi yang inklusif, agenda kemandirian ekonomi akan sulit tercapai. Oleh karena itu, strategi pembangunan nasional harus diarahkan pada penguatan tata kelola politik, peningkatan kualitas modal manusia secara berkelanjutan, serta percepatan transformasi digital sebagai pondasi bagi terciptanya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan global.

Referensi

1. Aghion, P., & Howitt, P. (2006). *The Economics of Growth*. MIT Press.
2. Autor, D., Levy, F., & Murnane, R. (2003). The skill content of recent technological change. *Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333.
3. Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
4. Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia : Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Policy for Accelerating Digital Transformation. 2, 27–40.

5. Bukht, R. & Heeks, R. (2018). Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. Development Informatics Working Paper Series, University of Manchester.
6. Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
7. Chen, W. (2020). Digital Economic Transformation and National Competitiveness. *Journal of Economic Policy Studies*, 12(3), 145–168.
8. Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2012). Schooling, educational achievement, and economic growth. *Journal of Economic Literature*, 50(3), 607–668.
9. ILO. (2020). *The Impact of Digitalization on Labour Markets in Emerging Economies*. International Labour Organization.
10. Muhammad, M. (2023). Industrialisasi sebagai Kekuatan Politik Negara. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Politik*. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme/article/view/375>
11. Idat, D. G. (2019). Memanfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional. 5–11.
12. OECD. (2019). *OECD Skills Strategy*. OECD Publishing.
13. Prastyo, D. D., Trisiana, A., Royani, M., & Agustina, P. (2024). Pengaruh Dinamika Politik dan Stabilitas Politik Terhadap Perubahan Ekonomi Global di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan*. <https://www.jurnal.uisu.ac.id/index.php/JEKKP/article/view/10222>
14. Romer, P. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102.
15. Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *American Economic Review*, 51(1), 1–17.
16. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
17. Shofiyani, A., & Salomo, R. V. (2025). Evaluasi Program Pengembangan Talenta Digital : Fresh Graduate Academy (FGA). 6(3), 1817–1830.
18. Sulistiyo, H., Martua, A., & dkk. (2023). GOVERNMENT PERFORMANCE PADA KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIGITAL: BAGAIMANA TRANSFORMATION TRANSFORMASI DIGITAL: BAGAIMANA TRANSFORMATION (STUDI EMPIRIS DI PROVINSI MALUKU UTARA). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 95-113.
19. Todaro, M. P., & Smith, S. (2015). *Economic Development*. Pearson.
20. UNCTAD. (2021). *Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows and Development*. United Nations Conference on Trade and Development.
21. World Bank. (2020). *Human Capital Project 2020 Update*. World Bank Group.
22. World Bank. (2020). *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. World Bank Publications.